

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah kebijakan yang dipandang demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Penerapan otonomi daerah di Indonesia yang merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi sudah menunjukkan progress yang ditandai sejak tahun 2001 yakni terdapat dalam ketentuan umum Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.

Di berlakukannya Otonomi Daerah berdampak pada terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan segala bentuk potensi didaerahnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Tujuan dari desentralisasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat agar menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antar

pusat dan daerah. Kebijakan ini menyebabkan setiap daerah harus mampu membiayai anggaran daerahnya. Pemerintah Pusat dapat membantu dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk membiayai daerah anggaran tersebut, selain itu Pemerintah Daerah dapat berusaha sendiri dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yakni salah satunya melalui pajak daerah.

Di sebagian daerah tingkat kemandirian masih sangat minim yaitu di bidang keuangan belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Sebagian pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat untuk menopang kegiatan terkait pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal karena belum memiliki sumber pendapatan asli daerah yang kuat. Desentralisasi fiskal pada prinsipnya mengharapkan minimnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, agar sesuai dengan tujuan otonomi daerah yakni terciptanya daerah yang mandiri. Untuk meminimalkan ketergantungan daerah terhadap pusat, yang harus menjadi sumber keuangan terbesar adalah pendapatan asli daerah (PAD) yang didukung oleh kebijakan perimbangan pusat dan daerah.

(Halim, 2001) dalam (Sasana, 2011), menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi, yaitu:

- 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

- 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah adalah terkait dengan pengelolaan seluruh pendapatan daerah oleh Pemerintah daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi, pemerintah daerah harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana amanah ini telah di berikan oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al Anfal Ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Selain Ayat diatas, juga dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahman bin Hanbal sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادِ النَّقْفِيُّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya:

“Rasulullah S.A.W bersabda: Tidak beriman orang yang tidak bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Dan tidak beragama orang yang tidak bisa menepati janjinya”. (HR. Ahmad bin Hambal)

Ayat dan hadits diatas menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah atau janji. Amanah jabatan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun masyarakat kepada Pemerintah daerah adalah salah satu bentuk amanah dari sesama manusia. Adapun kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud dari desentralisasi yakni masyarakat telah memberikan kepercayaannya kepada pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mendapatkan kesejahteraan mereka dan hal ini merupakan kewajiban untuk ditunaikan.

Pengeluaran dan penerimaan daerah dalam sistem perekonomian disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh melalui hak daerah tersebut untuk melakukan pinjaman, memungut pajak, kewajiban untuk membayar tagihan dan menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana yang telah disetujui oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan telah ditetapkan dengan Peraturan daerah (UU no 32 tahun 2004) terkait rencana keuangan. Perancangan APBD bertujuan agar Pemerintah daerah dapat memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan besaran pengeluaran yang akan dibelanjakan. APBD terdiri dari tiga komponen yaitu belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah yang memberi pengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu perekonomian daerah. Untuk memberikan hasil yang baik bagi daerah maka harus dikelola dengan baik pula.

Agar dapat memberikan manfaat untuk dinikmati oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian layanan umum, pemerintah harus mampu mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Ada beberapa indikator yang berkaitan dengan Belanja Daerah untuk memajukan kinerja dan potensi suatu daerah yaitu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dimana keadaan PDRB meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Sasana, 2011), menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berhubungan positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gorahe, dkk., 2013) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini karena semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Dengan peningkatan penerimaan daerah, akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Jadi, PDRB dan Belanja

Daerah memiliki hubungan yang positif. Jika PDRB mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat melanjutkan pembangunan daerah. (Abdullah & Halim, 2003), penelitiannya mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prakosa, 2004), yang juga mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dimana dalam hipotesis ini perubahan pengeluaran pemerintah daerah ditentukan oleh perubahan kenaikan dari penerimaan PAD. Dengan demikian dapat dikatakan kenaikan Belanja Daerah besar kecil perubahannya dari tahun ke tahun ditentukan oleh perubahan kenaikan dari penerimaan PAD terkait dengan kebijakan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam penyusunan APBD.

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam kemajuan perekonomian. (Sanusi & Yusuf, 2018), hasil penelitiannya mengatakan bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Penelitian Sanusi dan Yusuf sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devita, dkk., 2014), yang juga mengatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini karena penduduk merupakan subyek pembangunan dengan meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan Jumlah Penduduk yang semakin besar

akan memerlukan anggaran yang semakin besar, agar kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik maka pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Dalam (Sidik, dkk., 2000) mengenai transfer dari pemerintah pusat hal tersebut penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Aminus, 2018), mengatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wati & Fajar, 2017), yang juga mengatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini bisa dikatakan karena perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Dalam pelaksanaan desentralisasi, otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, sehingga peran transfer tidak dapat dihindari. Seharusnya besarnya nilai transfer dalam bentuk dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah dapat menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kenyataan yang terjadi adalah PAD dikesampingkan dan dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah untuk membiayai Belanja daerah. Kondisi ini ditunjukkan dengan tidak sebandingnya nilai pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu dikumpulkan oleh daerah dengan besarnya dana perimbangan (transfer) yang diterima pemerintah daerah.

Berdasarkan fungsinya, pendapatan asli daerah (PAD) seharusnya merupakan aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah Belanja daerah tertinggi pada tahun 2017 karena mulai berkembangnya potensi-potensi daerah khususnya potensi baru yaitu pariwisata dengan mulai banyaknya WNA yang datang ke Bangka Belitung. Ini bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor unggulan ini agar dapat meningkatkan pendapatan sehingga memudahkan Belanja daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya alokasi pengeluaran Belanja daerah ini, diharapkan meningkatnya daya tarik daerah dengan cara peningkatan infrastruktur, perbaikan prasarana, transportasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dunia usaha daerah dapat lebih berkembang dimana hal ini harus dilakukan oleh pemerintah dengan serius agar mendapatkan hasil yang maksimal demi kesejahteraan daerah dan masyarakat. Berikut data Belanja daerah Provinsi dan 7 Kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017.

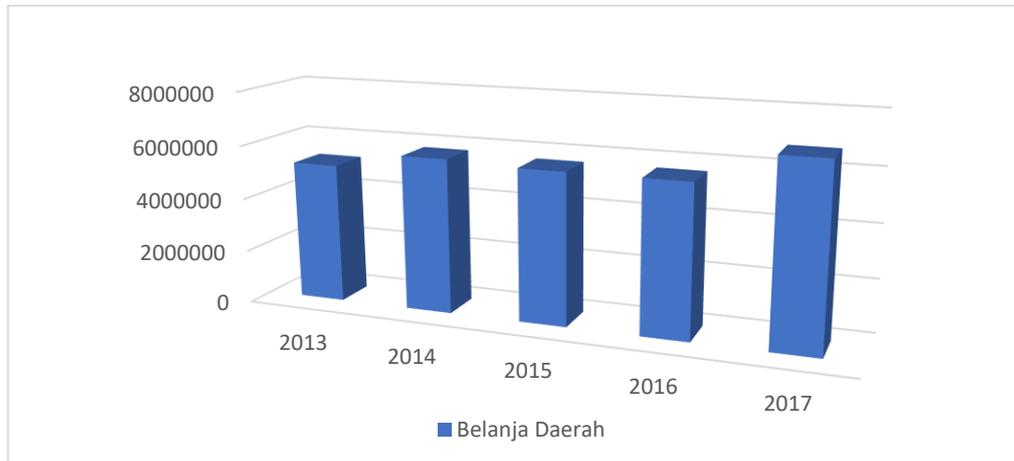
Tabel 1.1

Belanja Daerah dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam ribu rupiah)

Tahun	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Belanja Daerah
2013	2.886.638.796	2.334.804.889	5.221.443.685
2014	3.134.085.643	2.657.404.321	5.791.489.963
2015	3.029.842.159	2.640.970.775	5.670.812.934
2016	3.144.929.932	2.520.252.321	5.665.182.253
2017	3.488.724.248	2.873.645.428	6.773.640.575

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gambar 1.1
Belanja Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa Belanja daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp5.791.489.963.000 dan mengalami penurunan kembali sampai tahun 2016 yaitu Rp5.665.182.253.000. Ditahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp6.773.640.575.000. Kondisi yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah itu sendiri adalah kondisi keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta kemampuan dalam mengolah sumber-sumber keuangan daerah sangat mempengaruhi Belanja Daerah itu sendiri. Belanja daerah ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena semakin sedikit belanja daerah maka semakin rendah pula pelayanan publik yang akan diterima dan dinikmati masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus berusaha meningkatkan sumber pendapatan untuk meningkatkan Belanja daerah yakni pendapatan asli daerah (PAD) dan juga memaksimalkan transfer dari pemerintah tetapi tidak menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama.

Berikut data Belanja daerah di masing-masing Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013 sampai 2017.

Tabel 1. 2
Belanja Daerah 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung 2013-2017 (dalam
ribu rupiah)

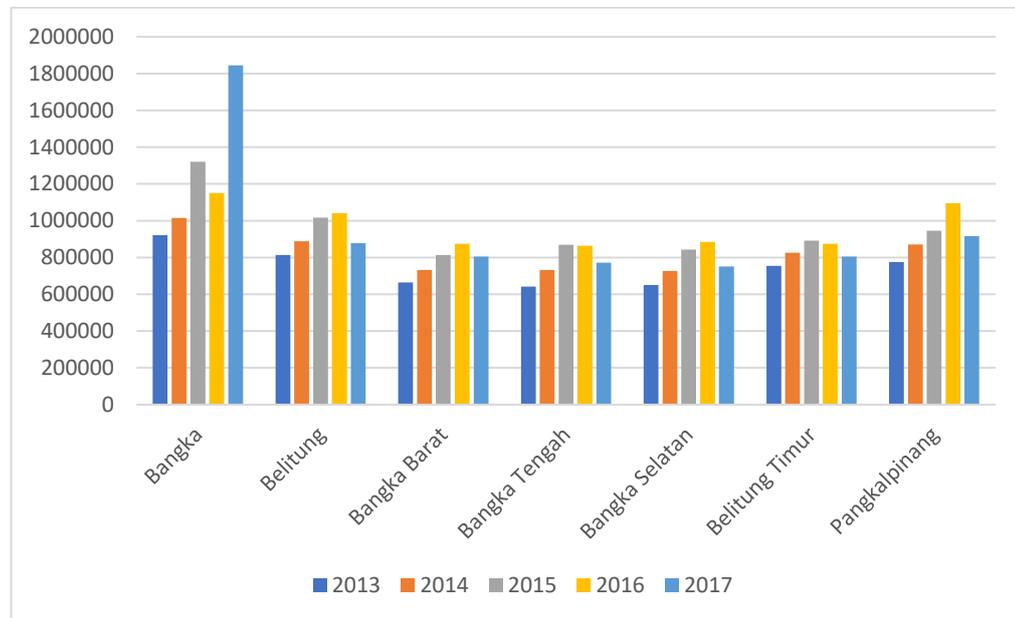
Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bangka	921.141.657	1.014.844.229	1.319.816.880	1.151.044.587	1.845.258.443
Belitung	813.105.076	888.919.306	1.016.351.764	1.040.198.565	878.639.555
Bangka Barat	664.938.953	732.461.657	813.479.007	874.320.587	804.495.544
Bangka Tengah	641.263.144	731.484.015	869.920.997	863.100.255	772.254.723
Bangka Selatan	650.558.329	727.076.889	842.686.305	884.115.256	751.396.370
Belitung Timur	755.401.550	826.090.248	891.299.174	875.126.397	805.661.052
Pangkal Pinang	775.034.976	870.613.619	945.642.996	1.095.342.719	915.934.888

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung

Berdasarkan data di atas Belanja Daerah untuk Kabupaten Bangka mengalami fluktuasi. Belanja Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp1.845.258.443.000 sedangkan paling rendah di tahun 2013 sebesar Rp921.141.657.000. Belanja Daerah di Kabupaten Belitung dari tahun 2013 sampai 2016 terus mengalami peningkatan tetapi di tahun 2017 menurun yaitu Rp878.639.555.000, sama halnya dengan Kabupaten Bangka Barat yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2016, di tahun 2017 turun menjadi Rp804.495.544.000. Belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017 yaitu Rp863.100.255.000 dan Rp772.254.723.000, Belanja Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar Rp869.920.997.000.

Gambar 1.2

Belanja Daerah 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung 2013-2017 (dalam juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung

Belanja Daerah di Kabupaten Bangka Selatan dari tahun 2013 sampai 2016 terus mengalami peningkatan dan di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp751.396.370.000 Belanja Daerah di Belitung Timur mengalami penurunan di tahun 2016 dan 2017 yaitu Rp875.126.397.000 dan Rp805.661.052.000, dan yang paling tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp891.299.174.000. Di Kota Pangkalpinang sampai di tahun 2016 terus mengalami peningkatan dan menjadi Belanja Daerah tertinggi di tahun tersebut sebesar Rp1.095.342.719.000 tetapi mengalami penurunan di tahun 2017 yaitu Rp915.934.888.000. Jadi, Belanja Daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka dan yang terendah yaitu Kabupaten Bangka Selatan. Maka terlihat bahwa di Provinsi kepulauan bangka belitung yang terdiri dari 6 Kabupaten dan 1 Kota memiliki penerimaan dan pengeluaran

keuangan pemerintahan yang masing-masing berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Setiap pengeluaran pemerintah daerah yang dilakukan berdasarkan kepemilikan pendapatan yang berupa penerimaan dari potensi-potensi daerah.

Tabel 1.3
Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung (%)

Kabupaten/ Kota	Belanja Pegawai dalam Belanja Tidak Langsung				
	2013	2014	2015	2016	2017
Bangka	83.3	84.7	83.3	76.9	71.4
Belitung	88.4	88.4	83.3	76.9	76.9
Bangka Barat	83.3	83.3	71.4	71.4	71.4
Bangka Tengah	76.3	83.3	76.9	71.4	71.4
Bangka Selatan	85.4	86.2	71.4	76.9	71.4
Belitung Timur	76.3	76.9	76.9	76.9	71.4
Pangkal Pinang	93.4	95.2	97.0	96.1	71.4

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bangka Belitung

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Belanja daerah, masalah yang sering terjadi adalah Belanja pegawai yang ada dalam Belanja tidak langsung, hingga mencapai lebih dari 50% dari total anggaran Belanja tidak langsung memberikan beberapa dampak salah satunya yaitu pemborosan dibagian pegawai. Alokasi dana yang seharusnya dimaksimalkan untuk pelayanan dasar masyarakat banyak digunakan untuk membiayai Belanja pegawai, akibatnya mengurangi alokasi untuk pelayanan publik atau masyarakat. Pada umumnya Belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Namun demikian, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan Belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah di tiap-tiap Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan lebih banyak

digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah. Misalnya digunakan untuk pembangunan daerah.

Dengan Belanja daerah kita bisa mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. Jika suatu daerah tingkat ketergantungan antara pemerintahnya terhadap pemerintah pusat rendah maka daerah itu bisa dikatakan mandiri, begitupun sebaliknya. Tetapi banyak terjadi problema bahwa belanja lebih besar dari pendapatan sehingga pemerintah daerah masih banyak tergantung kepada pemerintah pusat ditandai dengan transfer pemerintah pusat yang lebih besar dari pada Pendapatan asli daerah (PAD). Padahal kemajuan suatu daerah dilihat dari tingkat PAD. Meningkatnya transfer pemerintah kepada daerah dapat menimbulkan spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris dalam meningkatkan Belanja Daerah.

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah di 7 Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa topik tersebut belum pernah dikaji di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlebih secara khusus serta mendetail di setiap Kabupaten/kota. Dalam penelitian tersebut akan dilakukan pengujian serta dilihat bagaimana pengaruh Produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, jumlah penduduk dan dana perimbangan terhadap belanja daerah dari tahun 2013 sampai 2017, baik pengujian yang dilakukan secara bersamaan maupun pengujian tiap variabel secara individu. Regresi data panel menjadi metode pengolahan data dalam penelitian yang dilakukan penulis.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dan lebih fokus pada tujuan semula, maka penulis membatasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dengan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lingkup penelitian adalah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan periode waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2013 sampai 2017.

C. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang masalah, maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Belanja daerah dan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Belanja daerah di Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017?
- 2) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017?

- 3) Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017?
- 4) Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017.
- 2) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017.
- 3) Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017.
- 4) Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada 7 Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh dari variabel PDRB, PAD, Jumlah penduduk, dan Dana perimbangan dalam menentukan besaran nilai Belanja daerah (pengeluaran pemerintah) di 6 Kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Periode 2013 sampai dengan 2017, dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan Pemerintah pusat dan terutama Pemerinta daerah.
- 3) Menambah khasanah ilmu tentang menganalisa suatu masalah dalam hal ini tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).